

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terkait Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).<sup>3</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran” dalam Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah wujud peran serta masyarakat dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat terhadap penyiaran.

KPI memiliki fungsi menyusun sekaligus mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran untuk menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, Pertanggungjawaban. Operasionalisasi, dan evaluasi. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang yaitu:

---

<sup>3</sup> Irzha Friskanov. 2016. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Lex Ranaissance No. 1 VOL.1.

- a. menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.<sup>4</sup>

Peranan lembaga negara ini, yakni Komisi Penyiaran Indonesia sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat.

Dalam hubungan KPI pusat dan KPI daerah adalah untuk menjadikan penyiaran di seluruh Indonesia menjadi penyiaran yang berbasis positif dan sesuai dengan Undang-Undang yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh karena itu KPI pusat memberikan tugas dan wewenang kepada KPI daerah untuk memantau segala stasiun televisi yang berada di daerah untuk selalu waspada dengan apa yang disiarkan karena bersangkutan dengan masyarakat di daerah itu sendiri. Hal ini juga tidak jauh dengan pedoman standar siaran (P3SPS) yang mana sebagai acuan KPI

---

<sup>4</sup> Ibid

Daerah untuk lebih meningkatkan keamanan siaran dengan mematuhi segala aturan yang terkait dengan Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

Untuk menerapkan independensi dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya, KPID Jawa Timur mengaktifkan rapat-rapat pleno yang disepakati digelar minimal sekali seminggu. Hampir semua permasalahan yang muncul, khususnya yang strategis dan sensitif, selalu diangkat dan dibahas dalam rapat pleno. Dengan demikian, semua persoalan transparan dan diketahui semua komisioner yang juga diberi keleluasaan mempertanyakan berbagai hal yang dianggap tidak jelas. Praktik demikian juga diberlakukan pada jajaran sekretariat KPID Jawa Timur. Dalam aspek moralitas, setiap unsure komisi harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal melakukan komunikasi dengan publik, setiap anggota komisi berhak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan prinsip kebebasan yang bertanggungjawab. Batasan-batasannya adalah kearifan masing-masing anggota. Anggota komisi harus bersikap saling menghargai, saling menghormati pendapat yang disampaikan anggota komisi yang lain.

Dengan ini KPI pusat sebagai perancang sistem dan KPI daerah sebagai pelaksana untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk mengawasi segala bentuk siaran yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## B. Tinjauan Tentang Penyiaran

### 1. Pengertian penyiaran

Penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar / pemirsa di suatu tempat Berbeda dengan pemancaran, pemancaran sendiri berarti proses tranmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koksial atau saluran fisik yang lain. Sebagaimana artinya penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai *omnidirectional*. Dari definisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran terbatas.<sup>5</sup>

### 2. Sejarah Penyiaran

Bentuk dan format penyiaran serta sarana dan prasarana yang menunjangnya seperti sekarang ini memberikan makna bahwa penyiaran mempunyai sejarah sangat panjang, dimulai dari penemuan gelombang elektromagnetik pada 1864. Gelombang elektromagnetik ini dapat digunakan untuk mengirim informasi tanpa menggunakan penghantar (kawat) tembaga melalui jarak tertentu.

James Clerk Maxwell adalah salah satu penemu teori pemancaran yang paling menonjol. Dengan teori matematisnya pada tahun 1864 yang memprediksi adanya pancaran gelombang elektromagnetik. Ia meyakini bahwa kecepatan gelombang

---

<sup>5</sup> Wahyudi, J.B, 1994. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta. Penerbit Gramdeia, hal. 6

tersebut sama dengan kecepatan cahaya. Karena, seperti cahaya, maka gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan serta dibiaskan walaupun tidak dapat dilihat dan dirasakan.

Percobaan Maxwell diteruskan oleh beberapa ilmuwan/ilmuwan lainnya hingga mendapatkan hasil sebuah teknologi pemancaran yang bisa digunakan oleh massa seperti saat ini. Jika dilihat latar belakang lahirnya media penyiaran bahwa pendirian satu stasiun penyiaran yang kemudian melembaga menjadi satu lembaga penyiaran didasari oleh satu alasan tertentu yang hakiki. Alasan yang mendasari niat mendirikan stasiun penyiaran ternyata tergantung pada situasi kapan stasiun penyiaran itu didirikan.<sup>6</sup>

### 3. Karakteristik Penyiaran

Media penyiaran juga mempunyai karakteristik yang unik atau spesifik dibandingkan dengan media cetak atau media massa yang lainnya. Melalui media penyiaran, informasi dapat diterima pemirsa secara langsung atau biasa disebut dengan *real time* atau *live*. Semua kejadian atau peristiwa dapat secara langsung pada saat yang sama didengar/dilihat oleh pendengar/pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat luas dan efektif, tetapi informasi yang disampaikan oleh media penyiaran sudah langsung berlalu dan tidak dapat berulang lagi kecuali memang disiarkan ulang. Sementara pada media cetak, informasi yang diberikannya masih dapat dibaca kembali, di mana dan kapan saja. Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta. Penerbit Kencana, hal. 43.

bentuk penyiaran ada 3 yaitu penyiaran televisi, penyiaran radio dan penyiaran cetak.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Sanksi

#### 1. Defenisi Pelanggaran

Pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: *tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku*. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia.

penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrijven en overtredingen*.<sup>7</sup>

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtredingen* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32

<sup>8</sup> Ibid

Oleh karena KUHP Indonesia merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan beberapa perubahan, maka maksud pembentuk KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda, dapat dilihat dalam Surat Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang menyertai rancangan KUHP Belanda. Di sana dikatakan bahwa, ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan suatu tindak pidana. Ada kalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrecht*) sebelum pembentuk undang-undang berbicara, dan yang kita anggap tidak baik (*onrechtvaardig*), meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicara. Hal ini disebut sebagai kejahatan (*misdrift*). Ada kalanya ada suatu perbuatan, yang dalam arti filsafat hukum (*rechtphilosofisch*) baru menjadi pelanggaran hukum (*onrecht*) oleh karena dinyatakan demikian undang-undang, jadi yang tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang itu. Dalam hal ini ada pelanggaran (*overtredingen*).<sup>9</sup>

Sehingga, tidak boleh dilihat pada keadaan sebelum pembentuk undang-undang hukum pidana membentuk suatu ketentuan pidana. Sehingga tidak perlu dipedulikan apakah sebelum pembentukan ketentuan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana.

Bahwa suatu norma semacam ini belum dikenal sebelum pembentuk undang-undang mengadakan sanksi pidana, tidak berarti bahwa norma itu tidak ada. Norma itu hanya belum dikenal menurut pandangan masyarakat. Akan tetapi, setelah norma itu dikenal dan sekaligus pada waktu itu juga disertai ancaman pidana, maka

---

<sup>9</sup> Ibid

tidak ada perbedaan dengan pembentukan ketentuan hukum pidana dengan suatu norma, yang dulu sudah dikenal tetapi belum disertai ancaman pidana

Dengan demikian, penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.<sup>10</sup>

## **2. Pengertian sanksi**

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan.

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum

---

<sup>10</sup> Ibid



yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 40.

atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.<sup>12</sup>

Serta bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh KPID kepada stasiun televisi yang melanggar standart program siaran yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No 32 Thaun 2002 tentang penyiaran adalah :

- a. Teguran tertulis
- b. Penghentian sementara mata acarayang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c. Pembatan durasi dan waktu siaran
- d. Denda administratif
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran,atau
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

#### **D. Tinjauan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3SPS)**

---

<sup>12</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hal. 191

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS ialah konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengelola sistem penyiaran yang berbentuk lembaga independen lalu membentuk P3SPS. Proses pembuatan dari undang-undang hingga akhirnya menelurkan P3SPS tersebut juga memakan waktu yang cukup lama terhitung sejak reformasi dimulai. Apabila melihat kilas sejarah, sebelumnya penyiaran Indonesia bertumpuan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menandakan bahwa penyiaran saat masa itu merupakan bagian dari instrumen pemerintah dan kekuasaan yang semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan satu sistem penyiaran nasional dan disebutkan bahwa frekuensi dikuasai dan digunakan guna kepentingan negara. Selain itu, Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah.”. Undang-Undang No 24 Tahun 1997 bisa diartikan sebagai alat oleh pemerintah (dalam hal ini ialah Departemen Penerangan) untuk mengatur isi siaran guna tujuan dan bagi kepentingan tertentu.<sup>13</sup>

Berganti kepemimpinan dan rezim, membuat adanya pembenahan dalam Undang-undang Penyiaran dengan mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang disahkan pada 28

---

<sup>13</sup> *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman perilaku penyiaran dan Standar program siaran ( P3SPS ).2012*

Desember 2002. Meskipun saat itu tidak ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (5) menyatakan bahwa dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama namun tidak ditandatangani dalam 30 hari, rancangan tersebut sah menjadi undang-undang.

Undang-Undang tersebut lalu memecahkan paradigma saat itu mengenai pemerintah yang selalu mengendalikan penyiaran. Undang-Undang penyiaran yang baru justru membatasi peran pemerintah guna membuat tatanan demokratis melalui kebebasan berpendapat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Penyiaran saat itu mengamanatkan adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan membentuk regulasi bagi setiap dinamika penyiaran di Indonesia. Oleh karenanya, lahir KPI sebagai lembaga independen non-pemerintah yang bertugas mengawasi penyiaran. Hal ini diharapkan oleh masyarakat agar adanya kepastian hukum, diperolehnya isi siaran yang bermanfaat, menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya mendapatkan informasi secara bebas dan adil, menjamin kemandirian lembaga penyiaran, dan dapat melibatkan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.

SPS (Standar Program Siaran) Dalam menampilkan suatu isi siaran lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio ada aturan-aturannya, lembaga penyiaran tidak seenak-enaknya dalam menampilkan isi siaran kepada masyarakat, karena isi siaran yang ditampilkan ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang menonton isi siaran mereka. Agar isi siarannya ini berdampak positif bagi masyarakat yang menonton Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat suatu aturan mengenai isi siaran yaitu SPS (Standar Program Siaran). Di bawah ini peneliti akan menjelaskan

pengertian Standarisasi Program Siaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI” (P3SPS Tahun 2002). Melihat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa standar program siaran adalah suatu batasan-batasan yang buat Komisi Penyiaran Indonesia yang berisi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

Secara gamblang Undang-Undang Penyiaran memberikan KPI kewenangan yang dituangkan di Pasal 8 Ayat (2):

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan kewenangan tersebutlah lalu lahir P3SPS. P3SPS 2012 adalah regulasi penyiaran yang digunakan siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia saat ini menggantikan P3SPS 2004. Setelah membahas mengenai alasan dan hal-hal

---

<sup>14</sup> Ibid

yang berkaitan dengan berubahnya regulasi penyiaran di Indonesia, Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, frekuensi ialah milik publik dan harus dimaksimalkan guna kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi publik. Regulasi tentunya diperlukan untuk memastikan serta melindungi masyarakat sebagai publik yang memiliki frekuensi. Istilah lainnya, regulasi diperlukan sebagai garansi bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran bahwa informasi yang didapat publik merupakan informasi yang dilandasi semangat untuk meningkatkan derajat kualitas hidup publik. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengungkapkan bahwa media massa harus berperan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih merdeka dan lebih baik, bukan sebaliknya.

Regulasi menjamin masyarakat bahwa informasi yang diterima benar layaknya produk jurnalistik, yaitu memiliki informasi yang akurat, tidak tendensius, dan tidak memunculkan stereotip atau stigma. Sementara Denis McQuail mengungkapkan bahwa produk jurnalistik haruslah faktual atau sesuai fakta di lapangan, relevan atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, netral, dan berimbang dengan menekankan prinsip *cover both side*. Selain guna mendapatkan informasi yang benar, regulasi juga mengusahakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dikonsumsi dengan menimbang kepantasan informasi disiarkan kepada publik.

Proses demokratisasi dalam bentuk siaran dan lembaga penyiaran tersebut juga dimaksudkan agar publik mampu memilih dan mengendalikan penyiaran di Indonesia. Terlebih lagi, sistem penyiaran menggunakan frekuensi yang memiliki sifat terbatas sehingga penggunaannya harus sebesar mungkin untuk pelayanan

informasi serta kepentingan dan kebermanfaatan publik. Seperti dilansir dalam situs KPI, Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengungkapkan bahwa P3SPS mengatur penyiaran berupa bermuatan konten-konten yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa, menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Hal itu juga senada dengan Komisioner KPI Pusat lainnya, Dewi Setyarini, yang mengungkapkan bahwa penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS sendiri terbentuk berdasarkan dua hal. Pertama, yaitu pengelolaan sistem yang bebas dari berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran sebagai ranah publik dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Kedua, yaitu semangat guna menguatkan entitas lokal dan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid